



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

BIRO PERSIDANGAN, SISTEM INFORMASI DAN PENGAWASAN INTERNAL

Nomor SOP	SOP- 345 /PSP/2020
Tanggal Pembuatan	14 Desember 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	14 Desember 2020
Disahkan oleh	Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal  Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr. (Han) Brigadir Jenderal TNI
Judul SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI

DASAR HUKUM
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik3. Keputusan Sesjen Wantannas Nomor 06 Tahun 2018 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Publik dan Pelayanan Informasi Publik2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik







KETERKAITAN
1 SOP Pelayanan Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Permohonan Informasi2. Softcopi Permohonan Informasi3. Perangkat Keras : Laptop, Printer, dan Cap

PERINGATAN
Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi adalah Salah Satu Tugas dari Setjen Wantannas, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pengelolaan Permohonan Informasi pada PPID Setjen Wantannas tidak berjalan

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy

PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayan Informasi	PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan PPID	Syarat	Waktu	Output	
1	Menginventarisasi Informasi yang berpotensi dikecualikan					Dokumen	2 Hari	Dokumen	
2	Membuat daftar usulan informasu yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan					List daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan	1 Hari	List daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan dan dokumentasi informasi	
3	Menyampaikan daftar usulan yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan					List daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan dan dokumentasi informasi	1 Hari	List daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan dan dokumentasi informasi	
4	Melakukan Pengujian tentang Konsekuensi atas Daftar Informasi yang berpotensi Dikecualikan					List daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan dan dokumentasi informasi	3 Hari	List daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan dan dokumentasi informasi	
5	Memeriksa dan mempertimbangkan Daftar Infomrasi yang berpotensi sebagai infomrasi yang dikecualikan ke dalam Lembar Uji Konsekuensi. Memberikan pertimbangan sementara terhadap usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan.					Dokumen daftar usulan informasi yang dikecualikan	3 Hari	List daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan dan dokumentasi informasi	
6	Konsinyasi Draf Pengujian Konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan.					Draft lembar pengujian konsekuensi	3 Hari	Draft lembar pengujian konsekuensi	

7	Menyampaikan lembar Pengujian Konsekuensi dan meminta pertimbangan dan persetujuan Pembina.				Lembar pengujian konsekuensi	1 Hari	Lembar Pengujian Konsekuensi
8	Pertimbangan atas Lembar Pengujian Konsekuensi				Bahan pengujian konsekuensi	2 Hari	Lembar Pengujian Konsekuensi
9	Menetapkan Informasi yang Dikecualikan dalam bentuk Keputusan.				SK Informasi yang dikecualikan	1 Hari	SK PPID
10	Membuat laporan hasil pengujian konsekuensi.				Laporan	1 Hari	Laporan

Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal



[Signature]
 Drs. Haris Sajana, M.M., M.Tr. (Han)
 Brigadir Jenderal TNI